



*Buku Ajar*

# KEBIJAKAN PUBLIK



Rahma A. Alhasni, M.A.P.  
Dr. Fitri Herawati Mamonto, S.Ag, MAP.,  
Nancy Melisa Onibala, S.AP., MPA

BUKU AJAR  
KEBIJAKAN PUBLIK

Rahma A. Alhasni, M.A.P.  
Dr. Fitri Herawati Mamonto, S.Ag, MAP.  
Nancy Melisa Onibala, S.AP.,MPA



**TAHTA MEDIA GROUP**

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# BUKU AJAR KEBIJAKAN PUBLIK

Penulis:

Rahma A. Alhasni, M.A.P.  
Dr. Fitri Herawati Mamonto, S.Ag, MAP.  
Nancy Melisa Onibala, S.AP.,MPA

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

viii,96, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-280-9

Cetakan Pertama:

Januari 2024

---

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2024 by Tahta Media Group**

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP**  
**(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)**  
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Ajar Kebijakan Publik ini yang diperuntukan bagi seluruh mahasiswa di Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Dengan adanya buku ajar ini diharapkan dapat memberikan petunjuk yang terarah tentang kompetensi yang harus dicapai dan ruang lingkup materi pembelajaran yang perlu untuk dipelajari, serta membantu mahasiswa untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan.

Dalam penulisan buku ajar ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu saran dan kritik sangat diharapkan dari pembaca guna perbaikan buku ajar ini kedepannya. Semoga buku ajar ini bermanfaat bagi banyak pihak.

Manado, Januari 2024

Penulis

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I KONSEP DAN LINGKUP KEBIJAKAN PUBLIK.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Penyajian.....	1
C. Penutup.....	11
Latihan Soal.....	12
BAB II ISU DAN AGENDA KEBIJAKAN PUBLIK.....	13
A. Pendahuluan.....	13
B. Penyajian.....	13
C. Penutup.....	24
Latihan Soal.....	24
BAB III PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK.....	25
A. Pendahuluan.....	25
B. Penyajian.....	25
C. Penutup.....	52
Latihan Soal.....	52
BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK.....	54
A. Pendahuluan.....	54
B. Penyajian.....	54
C. Penutup.....	74
Latihan Soal.....	76
BAB V EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK.....	77
A. pendahuluan.....	77
B. penyajian.....	78
C. penutup.....	89
Latihan Soal.....	89
BAB VI EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PUBLIK.....	90
A. Pendahuluan.....	90
B. Penyajian.....	90
C. Penutup.....	96

Latihan Soal.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
PROFIL PENULIS .....	98

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Proses Kebijakan .....	39
Tabel 4.1. Model Implementasi Kebijakan Nakamura dan Smallwood ...	70
Tabel 5.1. Kaitan antara Pendekatan, Tujuan, Asumsi, Bentuk-bentuk Utama .....	82

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tahapan Kebijakan Publik .....	7
Gambar 2.1. Alur Agenda Setting Proses.....	22
Gambar 3.1. Kaitan Isu, Problem, dan Kebijakan .....	29
Gambar 3.2. Fase Perumusan Masalah .....	31
Gambar 3.3. Model Kebijakan Sistem .....	35
Gambar 3.4. Model Kebijakan Elite .....	36
Gambar 3.5. Model Kebijakan Kelompok .....	38
Gambar 3/6 Model Inkremental .....	41
Gambar 3.7. Model Demokrasi .....	42
Gambar 3.8. Model Deliberatif .....	49
Gambar 4.1. Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn .....	60
Gambar 4.2. Model Daniel Mazmanian dan Paul A Sabatier .....	61
Gambar 4.3. Model Grindel .....	63
Gambar 4.4. Model Jaringan 1 .....	65
Gambar 4.5. Model Jaringan 2 .....	66
Gambar 4.6. Model Implementasi Goggin, Bowman, dan Lester .....	69



## **BAB I**

# **KONSEP DAN LINGKUP KEBIJAKAN PUBLIK**

Dalam bab ini akan membahas mengenai konsep dan lingkup kebijakan publik. Adapun tujuan pembelajaran perkuliahan ini adalah :

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian kebijakan publik.
2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Sejarah perkembangan kebijakan publik.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan tahapan kebijakan publik.
4. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tingkatan kebijakan publik.

### **A. PENDAHULUAN**

Kebijakan publik merupakan suatu domain yang kompleks dan strategis dalam tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Konsep dan lingkup kebijakan publik melibatkan pemahaman mendalam terhadap proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh masyarakat. Melalui pemahaman konsep dan lingkup kebijakan publik, pemerintah dapat mengembangkan strategi yang lebih baik untuk merespons perubahan masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

### **B. PENYAJIAN**

#### **1. Pengertian Kebijakan Publik**

Secara etimologis istilah kebijakan pada mulanya berasal dari beberapa bahasa yakni: Yunani, Sangsekerta, dan Latin. Kata dasarnya (akar katanya) dari bahasa Yunani ialah *polis* yang artinya negara-kota dan *pur* yang artinya kota. Masuk dalam bahasa Latin berubah menjadi *politea* yang artinya negara (*state*), atau kata *polis* yang berpasangan dengan kata rumah tangga, atau kata *public* dengan *term res publica*, dan kata *private* yang berpasangan dengan *term res priva*.

Aristoteles (Lumingkewas, 2012), Menjelaskan bahwa kata *polis* menunjuk bentuk asosiasi atau organisasi yang paling tinggi. Karena itu. Tidak salah kalau kata *polis* diartikan sebagai kota besar atau organisasi yang tertinggi dimaksud adalah negara. Demikianpula dengan

kata *public privat* dalam konteks *polis* negara/kota yang digunakan dalam pembahasan kebijakan. Sangat sulit dipertemukan karena sering dipertentangkan.

Perkembangan selanjutnya kata polis berkembang menjadi tiga konsep yaitu:

- a. Police atau polivy atau polities; sebagai kegiatan pengendalian warga kota dengan maksud untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Sekarang lebih dikenal sebagai fungsi dan tugas pokok kepolisian (police).
- b. Police atau policy atau polities; dimaksudkan sebagai suatu implementasi kebijakan kota yang berkenan dengan pengendalian, pengurusan, pengaturan, dan penataan kota yang menjadi urusan, fungsi, dan tugas pokok pemerintahan kot/negara sebagai eksekutif.
- c. Police atau policy atau polities; dimaksudkan berkaitan dengan pengertian politik yang berkenan dengan kebijakan public sebagai kegiatan kenegaraan. Kegiatan dimaksudkan diarahkan pada proses perumusan tujuan-tujuan negara yang menjadi kebijakan negara (public policy).

Carl Friedrich (Lamani, 2020) bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam hal :

- a. Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksanaan kebijakan;
- b. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Kebijakan publik secara sederhana didefinisikan oleh Thomas R. Dye (Wahab, 2012) yang menyatakan bahwa kebijakan publik ialah "*whatever governments choose to do or not to do*" (pilihan tindakan apa pun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah). Kebijakan publik dapat bersifat hierarkis, mulai dari tataran nasional, regional, dan lokal. David Easton (1953) memberikan definisi kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh

anggota masyarakat. Laswell (1902) juga memberikan definisi kebijakan publik sebagai sebuah program pencapaian tujuan, nilai dalam praktik yang terarah.

Selanjutnya Malone (2014) (Lamani, 2020) kebijakan publik dapat digambarkan sebagai kerangka kerja keseluruhan tentang tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan publik, studi tentang keputusan pemerintah dan tindakan yang dirancang untuk menangani masalah yang menjadi perhatian publik. Kebijakan adalah tindakan yang bertujuan dan dirancang sebagai tanggapan terhadap masalah yang dirasakan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan tahapan pelaksanaan suatu program yang akan diselenggarakan oleh pemerintah untuk penyelesaian masalah-masalah dalam masyarakat.

## **2. Perkembangan Kebijakan Publik**

Perkembangan kebijakan publik berhubungan erat dengan pertumbuhan peradaban dari bangsa-bangsa yang memiliki kebebasan laut yang luas. Sehingga analisis kebijakan sebagai aktivitas yang terspesialisasi menyertai perubahan-perubahan di dalam organisasi sosial yang diikuti dengan bentuk-bentuk baru teknologi produksi dan pola pemukiman menetap. Contoh dokumen terkuno dari analisis kebijakan publik ditemukan di Mesopotamia yang berupa pakta-pakta pemerintahan dan politik. Dokumen itu disebut kode Hammurabi yang ditulis oleh penguasa Babilonia pada abad 18 sebelum masehi, yang mengekspresikan keinginan untuk membentuk ketertiban publik yang bersatu dan adil pada masa ketika babilonia mengalami transisi dari negara kecil menjadi negara wilayah yang luas.

Kode Hammurabi memiliki kesamaan dengan hukum Musa yang mencantumkan persyaratan-persyaratan ekonomi dan sosial untuk suatu pemukiman urban yang stabil di mana hak dan tanggungjawab didefinisikan menurut posisi sosial. Kode mencakup proses kriminal, hak milik, perdagangan hubungan keluarga dan perkawinan, dana kesehatan dan apa yang dikenal sekarang sebagai akuntabilitas publik. Sejarah yang tertulis tentang para spesialis menghasilkan pengetahuan tentang kebijakan dapat ditelusuri sampai abad keempat sebelum masehi. Di India, Arthashastra karya Kautilya, satu dari tuntunan-tuntunan awal tentang pembuatan kebijakan, keahlian bernegara dari administrasi pemerintahan, mensarikan apa yang telah ditulis sampai ketika itu (300 SM) mengenai materi yang saat ini disebut Ilmu Ekonomi. Kautilya, yang mengabdikan sebagai penasihat kerajaan Mauryan di India Utara, dapat

dibandingkan dengan Plato (427-327 SM), Aristoteles (384- 322 SM), dan Machiavelli (1469-1527), kesemuanya secara mendalam terlibat dalam aspek-aspek praktis pembuatan kebijakan pemerintah selain pekerjaan mereka sebagai pemikir-pemikir social. Plato mengabdikan sebagai penasihat dari penguasa di Sisilia, sementara Aristoteles mengajar Alexander dari Macedonia sejak orang tersebut terakhir berusia 14 tahun sampai ia naik tahta pada usia 20 tahun. Aristoteles, seperti para pemikir sosial kontemporer, yang menemukan bahwa politik praktis menjijikkan, cenderung menerima kedudukan tersebut dengan harapan agar dapat menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah publik (Taufiqurakhman, 2014).

### **1) Perkembangan pada Abad Pertengahan**

Ekspansi dan diferensiasi secara bertahap peradaban kota sepanjang abad pertengahan berlangsung dengan diikuti oleh strukturokupati yang memudahkan pengembangan pengetahuan yang terspesialisasi. Berbagai kelompok spesialis kebijakan diangkat oleh para pemimpin untuk memberikan saran dan bantuan teknis terhadap hal-hal yang kurang dikuasai oleh para penguasa misalnya pengambilan keputusan yang efektif, keuangan, perang dan hukum. Pertumbuhan "Politisi Profesional", memperoleh kedudukan yang berbeda di dunia. Di Eropa, India, Cina, Jepang dan Mongolia pada abad pertengahan para pendeta merupakan kelompok yang terpelajar, karena kelompok ini secara teknis sangat dibutuhkan. Para penulis yang terpelajar, yang pada zaman modern saat ini adalah penulis pidato presiden juga memiliki pengaruh terhadap pembuatan kebijakan. Di Inggris para bangsawan rendah dan para investor diangkat tanpa kompensasi untuk mengendalikan pemerintahan kota untuk kepentingan mereka sendiri. Pada akhirnya para ahli hukum ternama juga memiliki pengaruh dalam pembuatan kebijakan.

### **2) Zaman Revolusi Industri**

Pada zaman kuno dan pertengahan pertumbuhan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan mengikuti evolusi peradaban. Namun ketika terjadi revolusi industri pertumbuhan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan menjadi aktivitas yang relatif otonom dengan ciri khasnya sendiri dan dipisahkan dengan kepentingan politik sehari-hari. Zaman revolusi industri adalah masa dimana kepercayaan tentang perkembangan manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi lebih dominan di kalangan para pengambil kebijakan dan penasihatnya. Pada masa ini pembangunan dan pengujian teori-teori ilmiah dan masyarakat secara bertahap mulai dilihat sebagai satu-satunya cara untuk memecahkan permasalahan sosial. Pengaruh mistik, klenik, dan sihir

sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Mulai pada masa ini muncul pengetahuan yang relevan dengan kebijakan menurut ukuran empirisme dan metode ilmiah.

**a. Perkembangan pada Abad ke-19**

Pada abad 19 di Eropa mulai muncul generasi baru yang menghasilkan pengetahuan tentang kebijakan mulai mendasarkan efektivitas mereka pada dokumen data empiris yang sistematis. Pada masa ini perhatian terhadap pengumpulan fakta secara sistematis dapat diilustrasikan dengan beberapa cara. Misalnya dengan pengembangan statistik dan demografi sebagai bidang spesialisasi. Pada masa itu mulai bermunculan lembaga-lembaga yang memperhatikan secara khusus pada pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Lembaga-lembaga tersebut diorganisir oleh para bankir, ilmuwan, industrialis yang berusaha mengganti cara berfikir lama dalam menghadapi masalah sosial dengan metode baru yang lebih sistematis.

Pada abad 19, metode untuk menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan secara jelas mengalami perubahan dan transformasi yang besar. Pengetahuan mengenai alam dan masyarakat tidak lagi ditentukan menurut kesesuaiannya dengan otoritas, ritual dan prinsip-prinsip filsafat, tetapi dinilai berdasarkan konsistensinya dengan observasi empiris. Tetapi transformasi ini bukanlah merupakan hasil dari komitmen formal terhadap norma-norma empirisme dan metode ilmiah sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ketidakpastian yang datang bersama dengan transisi dari peradaban agraris ke industri.

Latar belakang analisis abad ke-19 dari analisis kebijakan kontemporer melanjutkan bagaimana ilmu sosial terapan ditumpangi oleh tujuan kelompok sosial yang dominan. Penggunaan ilmu untuk menemukan dan menguji hukum-hukum alam dan masyarakat dipandang sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai pengetahuan yang obyektif. Ilmu hanya dipandang sebagai alat untuk memproduksi pengetahuan. Akibatnya, pertanyaan tentang tujuan dipandang sebagai nonrasional atau sebagai ekspresi yang sewenang-wenang dari kepentingan pribadi yang berada di luar batas penelitian ilmiah. Sehingga produksi pengetahuan yang terspesialisasi ditetapkan sebagai “ilmu”.

**b. Perkembangan Abad ke 20**

Perkembangan ilmu yang mempelajari tentang kebijakan pada abad ini dapat digambarkan dengan adanya profesionalisasi ilmu

politik, administrasi negara, sosiologi, ekonomi dan disiplin ilmu sosial lainnya yang terkait. Selama abad 20 para ilmuwan kebijakan bukan lagi kelompok yang heterogen seperti bankir, industrialis, jurnalis, dan sarjana-sarjana yang mengendalikan lembaga statistik kuno dan lembaga penelitian kebijakan lainnya. Fungsi utama dari ilmuwan sosial pada masa ini adalah mengkaji masalah masalah kebijakan dan merumuskan solusi yang potensial. Adanya perang dunia II dan masalah penyesuaian kembali pasca perang memberi kesempatan para ilmuwan sosial untuk menerapkan nilai-nilai yang dianutnya untuk memecahkan masalah praktis.

Menurut Laswell dalam pengantarnya ” ilmu kebijakan” tidak dibatasi oleh tujuan teoritis ilmu, tetapi juga memiliki orientasi praktis yang mendasar. Tujuan ilmu kebijakan tidak hanya memberi sumbangan pada pengambilan keputusan yang efisien tapi juga untuk memberikan pengetahuan yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan pelaksanaan demokrasi. Perkembangan ilmu kebijakan setelah perang, sistematika studi kebijakan publik juga keluar dari administrasi negara dan kemudian menjadi disiplin ilmu di dalam ilmu politik. Ide “analisis” muncul bersama-sama dengan usaha-usaha untuk memisahkan masalah menjadi beberapa komponen yang mendasar. Sejauh analisis dalam arti sempit analisentrik ini mengabaikan aspek-aspek politik, sosial dan administratif dari kebijakan publik. Maka analisis kebijakan di dalam bentuknya yang baru ini dapat diartikan sebagai gerakan meninggalkan tradisi yang telah mapan pada abad 19 sampai abad 20-an.

### **3) Tahap-tahap Kebijakan Publik**

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita di dalam mengkaji kebijakan public (Charles, 1986). Namun demikian beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Seperti misalnya, tahap penilaian kebijakan seperti yang tercantum dalam bagan di bawah ini bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik, sebab masih ada satu tahap lagi, yakni tahap perubahan kebijakan dan determinasi atau penghentian kebijakan.

Dalam rangka pemecahan masalah ada beberapa tahap penting antara lain Dunn (Winarno, 2002) penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi kebijakan (*policy adoption*), implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan penilaian kebijakan (*policy assessment*).



Gambar Tahap Kebijakan

**a. Tahap penyusunan agenda**

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.

**b. Tahap formulasi kebijakan**

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang

ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternative bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing actor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

**c. Tahap adopsi kebijakan**

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, consensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

**d. Tahap implemementasi kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap dimana kebijakanyang telah diadopsi tesebut dilaksanakan oleh unit-unit administratif tertentu dengan memobilisasikan dana dan sumberdaya yang ada. Pada tahap ini proses monitoring dilakukan. Pada tahap ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implemetasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

**e. Tahap penilaian kebijakan**

Pada tahap penilaian kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauhmana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Pada dasarnya kebijakan publik dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan dalam memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat.

Selain itu model *policy making process* yang diungkapkan oleh Shafritz dan Russel (Keban, 2019) yang terdiri atas agenda setting dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi, keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan, implementasi, evaluasi program dan analisis dampak, dan feedback, yaitu memutuskan untuk merevisi atau menghentikandimana proses ini menyerupai suatu siklus.

**4) Tingkatan Kebijakan Publik**

Dalam perjalanan kebijakan dapat dilihat adanya tingkatan yang melibatkan dimensi nasional, regional, dan lokal. Nugroho 2006 ( Arifin, 2020) menegaskan bahwa secara sederhana tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dikelompokan menjadi tiga tingkatan yaitu:

- a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau, mendasar, yaitu UUD 1945, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.
- b. Kebijakan publik yang bersifat (meso) atau menengah atau penjas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk surat keputusan bersama atau SKB antar menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- c. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dari bentuk tingkatan kebijakan di atas, dapat dilihat bahwa kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau peraturan daerah merupakan kebijakan publik yang bersifat strategis tapi belum implementatif, karena masih memerlukan derivasi kebijakan berikutnya atau kebijakan publik penjas atau yang sering disebut sebagai peraturan pelaksana atau petunjuk pelaksanaan.

Abidin (2004) membedakan kebijakan dalam tiga tingkatan sebagai berikut :

- a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan pelaksanaan, yaitu kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang.
- c. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Mengenai tingkatan kebijakan publik secara teknis, Lembaga Administrasi Negara (1997) (Anggara, 2014) mengemukakan sebagai berikut.

**a. Lingkup Nasional  
Kebijakan Nasional**

Kebijakan nasional adalah kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional/ negara sebagaimana tertera dalam Pembukaan UUD 1945. MPR, Presiden, dan DPR adalah yang berwenang menetapkan kebijakan nasional. Kebijakan nasional yang dituangkan dalam peraturan

perundang-undangan dapat berbentuk UUD, Ketetapan MPR, Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU).

### **Kebijakan Umum**

Kebijakan umum adalah kebijakan Presiden sebagai pelaksanaan UUD, TAP MPR, UU, untuk mencapai tujuan nasional. Presiden berwenang menetapkan kebijakan umum. Kebijakan umum yang tertulis dapat berbentuk Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden.

### **Kebijakan Pelaksanaan**

Kebijaksanaan pelaksanaan merupakan penjabaran dari kebijakan umum sebagai strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu. Dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan, yang berwenang adalah menteri/pejabat setingkat menteri dan pimpinan LPND. Kebijakan pelaksanaan yang tertulis dapat berbentuk peraturan, keputusan, atau instruksi pejabat.

## **b. Lingkup Wilayah Daerah**

### **Kebijakan Umum**

Kebijakan umum di lingkup daerah adalah kebijakan pemerintah daerah sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan Rumah Tangga Daerah. Dalam menetapkan kebijakan umum di daerah provinsi, yang berwenang adalah Gubernur dan DPRD Provinsi. Di daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota. Kebijakan umum di tingkat daerah dapat berbentuk Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

### **Kebijakan Pelaksanaan**

Kebijakan pelaksanaan di lingkup Wilayah/Daerah ada tiga macam, yaitu:

- 1) kebijakan pelaksanaan dalam rangka desentralisasi merupakan realisasi pelaksanaan Peraturan Daerah.
- 2) kebijakan pelaksanaan dalam rangka dekonsentrasi merupakan pelaksanaan kebijakan nasional di Daerah.
- 3) kebijakan pelaksanaan dalam rangka tugas pembantuan (medebewind) merupakan pelaksanaan tugas Pemerintah Pusat di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Berikut ini yang berwenang menetapkan kebijakan pelaksanaan, antara lain:

- (1) dalam rangka desentralisasi adalah Gubernur/Bupati/Walikota;
- (2) dalam rangka dekonsentrasi adalah Gubernur / Bupati/Walikota;
- (3) dalam rangka tugas pembantuan adalah Gubernur/Bupati/Walikota;
- (4) dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan tugas pembantuan berupa Keputusan dan Instruksi Gubernur/Bupati/Walikota;
- (5) dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi berbentuk Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota

### **C. PENUTUP**

Kebijakan publik merupakan serangkaian langkah dan proses yang dirancang untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan pemerintah guna mengatasi berbagai permasalahan masyarakat. Konsep ini mencakup sejumlah dimensi, termasuk aspek teknis, politik, sosial, dan ekonomi, yang harus dipahami secara menyeluruh agar kebijakan dapat mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Tahap-tahap kebijakan publik, yang melibatkan identifikasi masalah, perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi, memberikan panduan sistematis dalam pengambilan keputusan pemerintah. Setiap tahap memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat relevan, efektif, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Sejarah perkembangan kebijakan publik mencerminkan evolusi dalam cara pemerintah mendekati permasalahan masyarakat. Seiring waktu, kebijakan publik telah berkembang untuk mengakomodasi kompleksitas isu-isu global seperti pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, dan ketidaksetaraan. Melalui proses yang transparan, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil, kebijakan publik dapat menjadi alat yang kuat dalam membentuk masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan berkembang.

Tingkatan kebijakan publik merujuk pada hirarki atau jenjang dalam berbagai jenis kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga terkait untuk mengatasi masalah atau dalam proses pencapaian tujuan tertentu. Secara keseluruhan tingkatan kebijakan publik menggambarkan kompleksitas dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat pemerintahan, dimana keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada koordinasi yang baik antar tingkatan, adanya partisipasi masyarakat, serta kemampuan kebijakan dalam menanggapi dinamika yang terus berubah dalam masyarakat suatu bangsa.

## **LATIHAN SOAL**

1. Sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan dalam kebijakan publik!
2. Jelaskan perkembangan sejarah kebijakan publik !
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kebijakan publik, dan mengapa pentingnya kebijakan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan?
4. Jelaskan mengapa tahapan identifikasi masalah merupakan hal yang Utama yang harus diperhatikan dalam proses kebijakan publik!
5. Sebut dan jelaskan tingkatan kebijakan publik!

---

---

## DAFTAR PUSTAKA

---

---

- Abidin, Said Zainal. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta: Pancar Siwah.
- Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Alaslan, Amtai. 2021. *Formulasi Kebijakan Publik: Studi Relokasi Pasar*. Purwokerto: CV Pena Persada
- Alan Setiawan, Hendrianto Sundaro, S.E., M.T, Agus Sarwo Edy Sudrajat. 2022. *Kajian Dampak Kebijakan Relokasi PKL Bantaran Kalies Sawah Besar Kota Semarang terhadap Kondisi Sosial dan EkonomPedagang*.<http://journals.usm.ac.id/index.php/ijsp>
- Charles Lindblom, proses penetapan kebijakan public, edisi kedua. Penerjemah Ardian Syamsudin. Jakarta : Airlangga 1986 hal 3.
- Dilapanga, Abdulrahman & Margareth I. R. Ratung.2022. *Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. CV. Budi Utama.
- Dunn, William N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Penerbit Kerjasama antara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dan Widya Karya Semarang.
- Illen La Reartha, Turtiantoro, Nunik Retno Herawati. 2023. *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Semarang* *Journal of Politic and Government Studies*.
- Keban, Yeremias T. 2019. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, teori, dan Isu*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Lasswell, Harold D. (Harold Dwight), 1902-1978, author. Power and society : a framework for political inquiry. ISBN 978-1-351-49744-2. OCLC 994145434.*
- Lamani & Budi Guntoro. 2020. *Budaya dan Desain Komunikasi Kebijakan Publik (Teori dan contoh Kasus Aplikasinya)*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Lumingkewas, Lexie A. 2012. *Kebijakan Publik*. Malang: Wineka Media Malang .
- Mani, La & Budi Guntoro. 2020. *Budaya dan Desain Komunikasi Kebijakan Publik (Teori dan contoh kasus aplikasinya)*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Merly Mutiara Saputri, Imam Hanafi, Mochamad Chazienul Ulum. 2015. *Evaluasi Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah melalui Program Bank Sampah (Studi di Bank Sampah*

- Sumber Rejeki Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri).<https://download.garuda.kemdikbud.go.id>.
- Mustari, Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera.
- Mustanir, A., Yusuf, A. and Sellang, K. 2022. ‘What Determines the Implementation of Development Planning Deliberations in The Village?’, in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Yogyakarta: IOP Publishing, p. 7. doi: 10.1088/1755-1315/1105/1/012029.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.
- Onibala, Melisa dkk.2023. *Analisi Kebijakan Publik*. Tahta MEdia Group.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Terjemahan Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Prenada Media.
- Razak, M. R. R. *et al.* 2022. ‘Information Technology Applications for Public Services in the Corona Pandemic Period in the Village’, in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Yogyakarta: IOP Publishing, p. 7. doi: 10.1088/1755-1315/1105/1/012051.
- Satispi, E. and Mufidayaiti, K. 2019. *Buku Ajar Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: UMJ Press.
- Septiana, R. Anis, dkk. 2023. *Kebijakan Publik. Teori, Formulasi, & Aplikasi*. Padang : PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Sulistio, E. B. 2021. ‘Isu Dan Agenda Kebijakan, Kepentingan Publik’, *Nuevos sistemas de comunicación e información*, pp. 1–8.
- Tahir, Arifin. 2020. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Taufiqurakhman.2014. *Kebijakan Publik pendelegasian tanggungjawab negara kepada presiden selaku penyelenggara pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wahab, H. Solihin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan dari fomulasi ke penyusunan model-mode implementasi kebijakan publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

---

## **PROFIL PENULIS**

---

Rahma A. Alhasni, M.A.P., Lahir di Lemoro, 25 Maret 1987. Penulis merupakan lulusan S1 Universitas Samratulangi Manado S2 Universitas Negeri Manado Saat ini penulis aktif sebagai Dosen Universitas Negeri Manado

Dr. Fitri Herawati Mamonto, S.Ag, MAP., Lahir : Kotamobagu, 30 April 1977. Penulis merupakan lulusan S1 Hukum Islam IAIN Manado, S2 Administrasi Publik Universitas Negeri Manado, S3 Administrasi Publik Universitas Negeri Makasar, Saat ini aktif sebagai Dosen program studi S1 dan program studi S2 Universitas Negeri Manado

Nancy Melisa Onibala, SAP,.MPA, Lahir di Manado 14 Oktober 1992. Penulis merupakan lulusan , S1 Universitas Samratulangi Manado , S2 Universitas Gadjah Mada , Saat ini aktif sebagai Dosen Universitas Negeri Manado



Buku Kebijakan Publik ini disusun secara khusus sebagai bahan ajar mahasiswa, juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan umum. Dalam buku ini membahas tentang; Konsep dan Lingkup kebijakan Publik, Isu dan Agenda Kebijakan Publik, Proses Perumusan Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Evaluasi Kebijakan Publik, Evaluasi Dampak kebijakan publik.



CV. Tahta Media Group  
Surakarta, Jawa Tengah  
Web : [www.tahtamedia.com](http://www.tahtamedia.com)  
Ig : tahtamedigroup  
Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISBN 978-623-147-280-9 (PDF)

